

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan, baik yang berupa potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Dengan adanya penduduk yang besar ini maka Indonesia mempunyai tenaga kerja yang besar pula. Untuk melindungi setiap hak dan kewajiban para tenaga kerja maka dilahirkannya Undang – Undang yang dapat melindungi setiap hak dan kewajiban para tenaga kerja yaitu dilahirkannya Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Di dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum ketenagakerjaan meliputi bidang kesehatan kerja yaitu selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Keamanan kerja yaitu perlindungan hukum bagi pekerja atas alat – alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relative singkat atau lama akan ada jaminan keselamatan bagi bagi pekerja. Dalam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.¹

¹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, 2009, hlm 11

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sesuai bunyi pasal 1 ayat 1 UU BPJS. Di dalam UU BPJS juga menjelaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling lama 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Dan pemberi kerja (perusahaan) secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan meliputi jainan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Kewajiban tiap perusahaan untuk mendaftarkan setiap karyawannya menjadi anggota BPJS tertuang dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan adanya kewajiban tersebut maka terdapat sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tetapi dalam realitanya masih banyak perusahaan yang tidak patuh dan tunduk pada peraturan Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 yakni masih banyak perusahaan yang belum atau bahkan tidak mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS.

Perusahaan yang dimaksud diatas tidak hanya perusahaan dalam skala besar tetapi yang dimaksud dari perusahaan itu adalah yang sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi menurut undang – undang tersebut mencakup semua bentuk usaha yang mempunyai tenaga kerja atau karyawan baik dalam skala besar maupun kecil. Setiap perusahaan bertanggung jawab untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun masih banyak didapati perusahaan yang enggan menjalankan aturan tersebut. Rata – rata perusahaan yang membandel itu didominasi perusahaan kecil dan menengah. Banyak alasan yang dikemukakan saat diminta mendaftarkan karyawannya padahal jaminan kesehatan karyawan itu adalah tanggung jawab perusahaan.

Dan didalam Undang – undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Menurut pernyataan undang – undang tersebut bahwa pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara. Namun mengingat kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program dan administrasi, maka perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara adalah perusahaan yang memperkerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi disini juga mencakup pengusaha kecil yang mempunyai kewajiban untuk mengikutsertakan karyawan atau tenaga kerjanya ikut BPJS.

Aturan tentang kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah disosialisasikan kepada perusahaan sejak tahun 2013. Seperti yang dikutip pada artikel bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memanggil sebanyak 300 perusahaan swasta terkait belum terdaftarnya perusahaan-perusahaan tersebut sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pemanggilan sebanyak 300 perusahaan atas dasar implementasi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. semua sudah sesuai prosedur yang berlaku mengenai UU Nomor 24 Tahun 2011 dan UU Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tentang perusahaan wajib mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib mendaftar maksimal tujuh hari setelah pemanggilan, jika tidak mematuhi maka terancam sanksi pidana delapan tahun kurungan atau denda Rp1 miliar². Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS (Pasal 17 ayat (3) UU BPJS). Selain itu, pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS dan wajib membayar serta menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS). Pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 55 UU BPJS).³

² Anonim, *Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Panggil 300 Perusahaan*, dalam <http://www.hukumonline.com>, diunduh 9 Maret 2017

³ Anonim, *Sanksi Perusahaan Jika Tidak Mendaftarkan Karyawan Menjadi Peserta Bpjs*, dalam <http://www.bpjs-kesehatan.net>, diunduh 14 Maret 2017

Hal ini juga demi kebaikan para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan agar lebih terjamin kesejahteraannya. Maka prosedur penyelesaian mengenai masalah perusahaan yang belum atau bahkan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi anggota BPJS dikaitkan pada sanksi yang akan diberikan. Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS adalah dikenakan sanksi administrative. Sanksi administrative sesuai pasal 17 No. 24 Tahun 2011 itu dapat berupa :

- a. Teguran Tertulis : dilakukan oleh BPJS
- b. Denda dan / atau : dilakukan oleh BPJS
- c. Tidak mendapatkan pelayanan public tertentu : dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Dari sanksi diatas maka lembaga yang berwenang memberikan sanksi tidak hanya oleh BPJS itu sendiri tetapi pemerintah juga dapat berwenang memberikan sanksi yang dapat diproses hingga ke pengadilan. Jaminan sosial merupakan konsep universal bagi redistribusi pendapatan, sehingga menjadi program publik yang diselenggarakan berdasarkan undang – undang. Demikian pula penunjukan badan penyelenggaranya harus didasarkan pada undang – undang karena merupakan badan otonomi yang mandiri. Menyadari pentingnya jaminan sosial dalam redistribusi pendapatan, jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara dan pelanggaran terhadap pelaksanaan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia bersumber pada landasan idiil, pembukaan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah

satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai resiko pasar tenaga kerja seperti resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain – lain. Jaminan sosial tenaga kerja diharapkan akan dapat memberikan ketenangan bekerja kepada pekerja dan sebagai timbal baliknya diharapkan pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dari fenomena permasalahan yang terjadi didalam masyarakat Atas dasar tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan di UMKM Tenun Sarung Tradisional Woronarto, Purwoasri, Kediri?
2. Faktor – faktor yang menghambat implementasi Pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan di UMKM Tenun Sarung Tradisional Woronarto, di Purwoasri Kediri?

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 180

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan di UMKM Tenun Sarung Tradisional Woromarto Purwoasri Kediri
2. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan UMKM Tenun Sarung Tradisional Woronarto, di Purwoasri Kediri?

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan bagi dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia pada mata kuliah hukum Ketenagakerjaan atau Hukum Perburuhan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam bidang ilmu hukum.

b. Bagi Pengusaha UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dalam memecahkan suatu masalah baik bagi penulis maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian

c. Bagi Tenaga Kerja

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi tenaga kerja untuk memperoleh hak – hak dari tenaga kerja.

E. Metode Penelitian

Didalam melakukan penulisan skripsi, dan untuk memberikan kebenaran dalam penulisan skripsi serta mencari data-data yang akan diteliti maka tidak lepas dari metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari studi di UMKM Tenun Sarung Tradisional Woromarto Purwoasri, Kediri melalui penelitian lapangan. Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan melihat kenyataan yang terjadi selama penelitian.⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih UMKM Tenun Sarung Tradisional Woromarto di Purwoasri, Kediri. Lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan populasi sekaligus sampel yang secara purposive sampling, yaitu “teknik

⁵Sidik Sunaryo, *Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UMM, 2012, Hlm 18.

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu “⁶. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan – tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri – ciri sampel yang ditetapkan untuk memudahkan penelitian. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat data-data maupun permasalahan implementasi pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan di UMKM tenun sarung tradisional Woromarto Purwoasri, Kediri yang sedang dikaji atau diteliti yang akan memberikan kontribusi yang banyak bagi penulis. Metode yang digunakan oleh penulis di lokasi penelitian nantinya akan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu pengambilan sample berdasarkan penilaian penulis mengenai siapa yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sample guna melengkapi bahan penulisan hukum.⁷

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama secara langsung dilokasi penelitian dengan cara memperoleh data berupa dokumen tertulis dari

⁶ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung. Hlm 85

⁷ Portal Statistik, *Metode Purposive Sampling*, <http://www.portal-statistik.com>, diunduh tanggal 24 April 2017.

lokasi UMKM Tenun Sarung Tradisional Woromarto, Purwoasri, Kediri. Informasi, pengamatan langsung, pendapat dari para pihak terkait, Footnote dll. Sumber data utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan responden dan pihak yang bersangkutan dengan implementasi pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan karyawannya ikut BPJS Ketenagakerjaan di UMKM Tenun Sarung Tradisional Woromarto, Purwoasri, Kediri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai data primer, data sekunder terdiri dari :

1. Berbagai bahan pustaka atau literatur yaitu berbagai buku-buku, jurnal, dan para ahli / sarjana yang terkait dengan penelitian ini.
2. Peraturan perundang-undangan
 - a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

c. Data Tersier

Data tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Semua pelaku bisnis atau pengusaha UMKM di Purwoasri, Kediri, yang menjadi sampel lokasi penelitian.
2. Responden pekerja di perusahaan UMKM yang menjadi sampel lokasi penelitian dilihat dari jumlah pekerja di UMKM lokasi penelitian.
Metode ini dipakai karena peneliti akan langsung menuju beberapa responden yang telah dipilih sebagai sampel untuk diwawancarai.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan dokumen yang diperoleh dari responden mengenai implementasi pasal 15 Undang – undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya ikut BPJS Ketenagakerjaan di UMKM Tenun Sarung Tradisional Woromarto Purwoasri, Kediri yang dipilih melalui metode Purposive Sampling.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan berbagai literature seperti buku maupun jurnal. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan data – data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, penelitian

sebelumnya, serta media massa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian. Kemudian data-data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jenis data yang terdapat dalam penulisan.

d. Teknik Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur serta menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan penelitian hukum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab tersiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat didalamnya 6 sub bab. Yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian, kegunaan penulisan/penelitian, metodologi penulisan/penelitian dan sistematika penulisan.

⁸ Noeng Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta. Rake Sarasin. Hal.139.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

dalam bab ini berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.

